

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adjikoesoemo, BSW. 2012, *Pembelaan Tanah untuk Rayat, Jogja Gate: Pengkhianatan Terhadap HB IX dan PA VIII*, Sami Aji Center, Yogyakarta.

Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Luthfi, Ahmad Nashih., Dian Andika Winda, M. Nazir S dan Amin Tohari, 2009, *Keistimewaan Yogyakarta: yang Diingat dan yang Dilupakan*, STPN Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Poerwokoesoemo, Soedarsiman, 1985, *Kasultanan Yogyakarta, Suatu Tinjauan Tentang Kontrak Politik (1877-1940)*, Gadjah Mada Universiy Press, Yogyakarta.

Ranuwidjaja, Usep, 1955, *Swapraja, Sekarang dan di Hari Kemudian*, Djambatan, Jakarta.

Sabdacarakatama, Ki, 2008, *Sejarah Keraton Yogyakarta*, Narasi, Yogyakarta.

Safitri, Myrna., Soetandyo Wignjosoebroto, Dahniar Andriani, Lidwina Inge Nurtjahyo, Andiko, Taqwadin Husein dan Piter Bala Wukak, 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Epistema Institute bekerjasama dengan HuMa dan Forest People Programme, Jakarta.

Santoso, Urip, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sembiring, Julius., 2012, *Tanah Negara*, STPN Press, Yogyakarta

Smith, Eve Darian, Frans von Benda Beckmann., 2008, *Journal of Legal Pluralism*, The Deutsche Nationalbibliothek.

Soedargo, 1973, *Hukum Agraria dalam Era Pembangunan*, Prisma, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Pustaka*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T.O, Ihromi, 1993, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Anggraeni, Tyas Dian, 2012, *Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Vol 1 No. 1, hlm 1

Ari Wibowo, Danang, 2010, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pakai atas Sultan Grond Setelah Berlakunya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum UGM

Buletin LPMPDP, 2007, *Hak atas Tanah Keraton Kasultanan Yogyakarta*, edisi 01, November 2006-Januari 2007

Griffiths, John, 1986, *What Is Legal Pluralism*, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* The Foundation for Journal of Legal Pluralism Number 24

Kim, Kensie, *Mixed System in Legal Origin Analysis*, Southern California Law Review, Vol. 83, No. 639.

Palmer, 2007, *Mixed Legal System...and The Myth of Pure Law*, Journal of Louisiana Law Review, Vol 67, No 4.

Nurjaya, I Nyoman, 2004, '*Perkembangan Konsep Pluralisme Hukum*'
Konfersensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di
Indonesia yang Sedang Berubah, 11-13 Oktober 2004, Jakarta

Sri Antoro, Kus 2014, *Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria*,
Jurnal Bhumi, No 39 April 2014, STPN Yogyakarta

-----, 2015, *Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Bidang Pertanahan*, Jurnal Bhumi vol 1, No 1 STPN Press,
Yogyakarta.

Zakaria, Yando, 2016, *Lemahmu Udu Duwekmu: Mengurai Hak Milik atas
Tanah, Perspektif Warga DIY*, makalah disukusi Jogja Darurat Agraria pada
20 September 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 48).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 483).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005): Uji Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 ((Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004): Uji Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004: Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61).

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan 5 September 1984).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1956 Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1984 Nomor 34).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1).

D. Artikel Internet

<https://selamatkanbumi.com/id/pada-mulanya-adalah-dusta-bagian-pertama/>, diakses pada 20 Juli 2017

<https://selamatkanbumi.com/id/pada-mulanya-adalah-dusta-bagian-kedua/>, diakses pada 20 Juli 2017



CHRISTOPER BAGAS WIRAWAN, Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Pidato Sultan Hamengku Buwono IX pada sambutan sidang paripurna di gedung

DPRD

Provinsi

DIY

dalam

[https://m.tempo.co/read/news/2015/09/15/058700934/sultan-hb-x-tak-ada-](https://m.tempo.co/read/news/2015/09/15/058700934/sultan-hb-x-tak-ada)

tanah-negara-di-yogya, edisi Selasa 15 September 2015, diakses pada tanggal

24 Juli 2017

<https://www.merdeka.com/peristiwa/bpn-tegaskan-wni-nonpribumi-tidak-berhak->

memiliki-tanah-di-yogya.html., diakses pada 25 Juli 2017